



Transformasi Digital Layanan Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali

I Nyoman Trisna Wahyu Raharja Meranggi^{*a}, Juwita Pratiwi lukman^a

^a Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayaa

* Correspondence: raharjameranggi788@gmail.com

Abstract

This article reviews the digital transformation in correctional services carried out by the Bali Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. Through a qualitative approach with a literature study method, the article describes various information and communication technology (ICT) initiatives and implementations that have been implemented, such as the development of SDP applications and online complaint systems. This transformation aims to improve efficiency, transparency and accountability in the management of prisoners and detainees, as well as having a positive impact on the community and correctional officers. Data collection methods through books, scientific journals, news articles, official websites, and laws and regulations provide a strong theoretical foundation to support the results and discussion of the benefits and challenges of this digital transformation.

Keywords: Digital transformation, Correctional services, Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights Bali

Abstrak

Artikel ini mengulas transformasi digital dalam layanan pemasyarakatan yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, artikel menjelaskan berbagai inisiatif dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah diterapkan, seperti pengembangan aplikasi SDP dan sistem pengaduan online. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan narapidana dan tahanan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan petugas pemasyarakatan. Metode pengumpulan data melalui buku, jurnal ilmiah, artikel berita, website resmi, dan peraturan perundang-undangan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung hasil dan pembahasan mengenai manfaat serta tantangan dalam transformasi digital ini.

Kata Kunci: Transformasi digital, Layanan pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham Bali

I. Pendahuluan

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengemban peran penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Salah satu tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pemasyarakatan, yang bertujuan untuk membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar menjadi anggota masyarakat yang berdisiplin, produktif, dan bertanggung jawab (Budianto et al., 2021).

Di era digital ini, tuntutan terhadap kualitas layanan publik semakin tinggi. Masyarakat menginginkan layanan yang mudah diakses, cepat, akurat, transparan, dan akuntabel. Kemenkumham pun dituntut untuk berbenah diri dan meningkatkan kualitas layanannya, termasuk layanan pemasyarakatan. Berbagai faktor mendorong transformasi digital layanan pemasyarakatan di Kemenkumham, seperti pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik, kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, keinginan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan, serta perkembangan regulasi yang mendorong transformasi digital (Firdaus & Yuningsih, 2023).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi yang mendorong transformasi digital, seperti UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 19 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik di Bidang Pemasyarakatan Berbasis Elektronik. Kemenkumham telah mengambil beberapa langkah untuk mentransformasi layanan pemasyarakatan, seperti mengembangkan infrastruktur TIK,

mengembangkan aplikasi dan sistem informasi, melakukan pelatihan bagi aparatur sipil negara, dan membangun budaya digital di lingkungan Kemenkumham.

Transformasi digital layanan masyarakat di Kemenkumham diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan kinerja aparatur sipil negara, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kemenkumham (Firdaus & Yuningsih, 2023).

Meskipun banyak manfaat yang diharapkan, transformasi digital layanan masyarakat di Kemenkumham juga memiliki beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya literasi digital pada aparatur sipil negara, keterbatasan infrastruktur TIK di beberapa daerah, dan potensi penyalahgunaan teknologi.

Kemenkumham perlu terus melakukan upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar transformasi digital layanan masyarakat dapat berjalan dengan sukses. Transformasi digital layanan masyarakat di Kemenkumham merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mewujudkan good governance di lingkungan Kemenkumham. Diharapkan dengan transformasi digital, Kemenkumham dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Transformasi Digital Layanan Masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak memiliki tanggal pasti yang spesifik untuk seluruh Indonesia. Secara umum, transformasi digital di mulai sejak tahun 2020, seiring dengan diluncurkannya Roadmap Nasional Transformasi Digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO, n.d.).

Di Kemenkumham sendiri, langkah nyata transformasi digital ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Permenkumham No. 30 Tahun 2021, n.d.). Sejak saat itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan transformasi digital di berbagai unit kerja Kemenkumham, termasuk Direktorat Jenderal Masyarakat (Ditjenpas). Beberapa contoh upaya transformasi digital di Ditjenpas:

- Diluncurkannya aplikasi Sistem Database Masyarakat (SDP) pada tahun 2006 untuk mengelola data narapidana dan tahanan secara elektronik.
- Diimplementasikannya Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) untuk mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara.
- Dikembangkannya aplikasi E-PAS untuk memudahkan layanan bagi narapidana dan tahanan, seperti layanan kunjungan keluarga, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan.
- Diterapkannya tanda tangan elektronik dalam berbagai proses administrasi.

Transformasi digital di lingkungan Kemenkumham masih terus berkembang, dengan target untuk mewujudkan layanan masyarakat yang modern, mudah diakses, akuntabel, dan berstandar internasional (Nugroho & Setyawan, 2019).

Sebelum adanya transformasi digital, Layanan Masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dilakukan secara manual, dengan menggunakan sistem yang berbasis kertas.

Berikut beberapa contoh proses layanan masyarakat yang dilakukan secara manual:

- Pendaftaran narapidana dan tahanan: Data narapidana dan tahanan dicatat secara manual dalam buku register.
- Pencatatan kegiatan narapidana dan tahanan: Kegiatan narapidana dan tahanan, seperti kegiatan pembinaan, kunjungan keluarga, dan pemeriksaan kesehatan, dicatat secara manual dalam buku jurnal.

- Penyampaian surat menyurat: Surat menyurat antara narapidana, tahanan, dan keluarga dilakukan secara manual.
- Pembayaran layanan: Pembayaran layanan, seperti layanan kunjungan keluarga, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan, dilakukan secara tunai.

Meskipun transformasi digital telah membawa banyak manfaat, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya literasi digital. Kemenkumham terus berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mewujudkan transformasi digital yang berkelanjutan dalam Layanan Pemasyarakatan.

Berbagai faktor mendorong transformasi digital layanan pemasyarakatan di Kemenkumham. Pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat telah membuka peluang baru untuk meningkatkan kualitas layanan publik (Yunaningsih et al., 2021). Teknologi digital memungkinkan Kemenkumham untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien kepada masyarakat. Kedua, tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik mendorong Kemenkumham untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanannya. Masyarakat menginginkan layanan yang mudah diakses, cepat, akurat, transparan, dan akuntabel. Transformasi digital merupakan salah satu strategi yang tepat untuk memenuhi tuntutan tersebut. Ketiga, kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan mendorong Kemenkumham untuk memanfaatkan teknologi digital. Transformasi digital dapat membantu Kemenkumham untuk mengotomatisasi proses layanan, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Keempat, keinginan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan mendorong Kemenkumham untuk menerapkan transformasi digital. Teknologi digital dapat membantu Kemenkumham untuk membuka akses informasi kepada publik dan meningkatkan akuntabilitas layanannya (Raba, 2006). Kelima, perkembangan regulasi yang mendorong transformasi digital juga mendorong Kemenkumham untuk melakukan transformasi layanan pemasyarakatan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi yang mendorong transformasi digital, seperti UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 19 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik di Bidang Pemasyarakatan Berbasis Elektronik.

Transformasi digital telah menjadi agenda penting dalam berbagai sektor pemerintahan di Indonesia, termasuk dalam bidang pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Kanwil Bali, telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam layanan pemasyarakatan. Artikel ini akan mengulas berbagai inisiatif dan implementasi transformasi digital yang dilakukan oleh Kanwil Bali dalam meningkatkan kualitas layanan kepada warga binaan dan masyarakat luas.

Transformasi digital di Kanwil Bali Kementerian Hukum dan HAM telah membawa berbagai inovasi yang signifikan dalam layanan pemasyarakatan. Salah satu inisiatif utama adalah penerapan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), sebuah platform digital yang dirancang untuk mengelola data narapidana dan tahanan secara terintegrasi. Melalui SDP, informasi tentang narapidana, termasuk identitas, status hukuman, dan riwayat kesehatan, dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petugas pemasyarakatan. Sistem ini mempercepat proses administrasi, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan narapidana (Irawan et al., 2019).

Untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terkait layanan pemasyarakatan, Kanwil Bali telah mengembangkan aplikasi layanan pengaduan online. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pengaduan secara online, yang kemudian ditangani secara sistematis oleh petugas yang berwenang. Pengaduan yang diajukan melalui aplikasi ini diproses lebih cepat, meningkatkan akuntabilitas layanan, dan menyediakan saluran komunikasi langsung antara masyarakat dan pihak pemasyarakatan.

Digitalisasi dokumen dan arsip juga menjadi fokus utama dalam transformasi digital ini. Dokumen yang sebelumnya berbentuk fisik kini disimpan dalam format digital, memudahkan akses dan pengelolaan. Dengan digitalisasi, kebutuhan ruang penyimpanan fisik berkurang, pencarian dokumen menjadi lebih efisien, dan keamanan serta ketahanan data meningkat.

Berbagai inisiatif digital yang diterapkan oleh Kanwil Bali Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan melalui teknologi. Dengan langkah-langkah inovatif ini, diharapkan layanan pemasyarakatan di Bali dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan dampak positif bagi narapidana dan masyarakat luas.

Masyarakat menginginkan layanan yang mudah diakses, cepat, akurat, transparan, dan akuntabel. Kanwil Kemenkumham Bali tak mau ketinggalan. Berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, Kanwil Kemenkumham Bali bergerak maju dengan mengimplementasikan transformasi digital dalam layanan pemasyarakatan. Langkah ini sejalan dengan arahan nasional Kemenkumham untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kanwil Kemenkumham Bali menyadari bahwa transformasi digital adalah kunci untuk mewujudkan layanan pemasyarakatan yang lebih modern, efisien, dan efektif.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (Moleong, 1989.

Zed, n.d.). Metode studi literatur dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis transformasi digital layanan pemasyarakatan di Kemenkumham berdasarkan informasi yang tersedia dalam literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel berita, website resmi Kemenkumham, dan peraturan perundang-undangan.

Metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk menjelajahi berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel berita, website resmi Kemenkumham, dan peraturan perundang-undangan (M.Si & M.Si, 2019). Hal ini memberikan gambaran yang holistik dan kontekstual tentang transformasi digital layanan pemasyarakatan di Kemenkumham.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya dan relevan dengan topik penelitian. Hal ini untuk memastikan kualitas dan validitas data yang dikumpulkan.

- **Buku:** Buku-buku yang membahas tentang transformasi digital, layanan publik, dan pemasyarakatan dipilih untuk memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian.
- **Jurnal ilmiah:** Jurnal ilmiah yang memuat penelitian tentang transformasi digital layanan publik, khususnya dalam konteks pemasyarakatan, dipilih untuk memperoleh informasi terbaru dan temuan penelitian yang relevan.
- **Artikel berita:** Artikel berita yang membahas tentang transformasi digital layanan pemasyarakatan di Kemenkumham dipilih untuk memperoleh informasi terkini tentang perkembangan transformasi digital di Kemenkumham.
- **Website resmi Kemenkumham:** Website resmi Kemenkumham yang memuat informasi tentang transformasi digital layanan pemasyarakatan dipilih untuk memperoleh informasi resmi dari sumber terpercaya.
- **Peraturan perundang-undangan:** Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transformasi digital dan layanan publik, khususnya dalam konteks pemasyarakatan, dipilih untuk memahami landasan hukum yang mendasari transformasi digital.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan makna dari data yang terkumpul.

III. Hasil dan Pembahasan

Menuju Layanan yang Lebih Cepat, Mudah, dan Akuntabel

Kanwil Kemenkumham Bali terus bergerak maju dalam mengimplementasikan transformasi digital dalam layanan pelayanannya. Hal ini sejalan dengan arahan nasional Kemenkumham untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Upaya Transformasi Digital di Kanwil Kemenkumham Bali:

- Membangun infrastruktur TIK yang kokoh, jaringan internet yang stabil, server yang handal, dan perangkat keras yang canggih menjadi fondasi penting untuk mendukung kelancaran layanan digital. Kanwil Kemenkumham Bali secara berkelanjutan meningkatkan infrastruktur TIKnya untuk memastikan kelancaran layanan digital.
- Mengembangkan aplikasi dan sistem informasi yang inovatif. Berbagai aplikasi dan sistem informasi inovatif telah dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pelayanannya, seperti:
 - SIMPEL (Sistem Informasi Online Perkara Pidana): Digunakan untuk mengelola data perkara pidana secara digital, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan.
 - Sistem Informasi Manajemen Data Narapidana berbasis web: Digunakan untuk mengelola data narapidana, seperti data diri, biodata, dan riwayat pidana.
 - SIPPON Online (Surat Pembebasan Bersyarat Online): Digunakan untuk mengelola proses pengajuan dan penerbitan Surat Pembebasan Bersyarat secara online.
- Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan. ASN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali diberikan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi digital. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran implementasi layanan digital dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- Kanwil Kemenkumham Bali aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang layanan digital yang tersedia. Berbagai media sosial, website resmi, dan kegiatan sosialisasi langsung dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat luas.

Arah Transformasi Digital Layanan Pelayanannya di Kanwil Kemenkumham Bali

Kanwil Kemenkumham Bali terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah dengan menerapkan transformasi digital pada layanan pelayanannya. Transformasi ini bertujuan untuk mewujudkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan akuntabel bagi masyarakat.

Infrastruktur TIK yang kokoh merupakan fondasi penting untuk mendukung kelancaran transformasi digital (Sustono, 2017). Oleh karena itu, secara berkelanjutan melakukan upaya-upaya untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur TIK. Jaringan internet diperluas, kapasitas server ditingkatkan, perangkat keras dimodernisasi, pusat data dibangun, dan keamanan siber diperkuat.

Berbagai aplikasi dan sistem informasi inovatif telah dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pelayanannya. SIMPEL (Sistem Informasi Online Perkara Pidana), Sistem Informasi Manajemen Data Narapidana berbasis web, dan SIPPON Online (Surat Pembebasan Bersyarat Online) adalah beberapa contoh aplikasi yang telah diluncurkan. Aplikasi-aplikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus berbagai keperluan terkait pelayanannya, seperti pendaftaran perkara, kunjungan tahanan, dan pembayaran biaya pemeliharaan narapidana.

Transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada sumber daya manusia yang mumpuni (Riyadi & Noerman, 2023). Kanwil secara berkala mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam menggunakan teknologi digital. Selain itu, aktif melakukan sosialisasi dan edukasi

kepada masyarakat tentang layanan digital yang tersedia. Hal ini dilakukan dengan berbagai media sosial, website resmi, dan kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Transformasi digital telah memberikan banyak dampak positif bagi layanan pemasyarakatan di Kanwil Kemenkumham Bali. Proses layanan menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat, sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Kualitas layanan juga meningkat, menjadi lebih mudah diakses, transparan, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Kinerja ASN juga meningkat, dengan bantuan teknologi digital mereka dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Transparansi dan akuntabilitas juga meningkat, masyarakat dapat memantau proses layanan dan kinerja secara online. Akses masyarakat terhadap layanan juga semakin mudah, masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah, baik secara online maupun offline.

Meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran, keterampilan ASN, dan minat masyarakat, Kanwil Kemenkumham Bali terus berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada. Keterbatasan anggaran diatasi dengan mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerjasama dengan pihak swasta atau memanfaatkan dana hibah dari pemerintah pusat. Keterampilan ASN diatasi dengan meningkatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN dalam menggunakan teknologi digital. Minat masyarakat diatasi dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat layanan digital.

Transformasi digital di Kanwil Kemenkumham Bali merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mewujudkan good governance. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak, transformasi digital layanan pemasyarakatan diharapkan dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Instansi terus berkomitmen untuk mewujudkan layanan pemasyarakatan yang lebih cepat, mudah, dan akuntabel melalui transformasi digital. Dengan terus berinovasi dan berbenah diri, Kanwil Kemenkumham Bali yakin dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Bali.

IV. Kesimpulan

Transformasi digital layanan pemasyarakatan di Kanwil Kemenkumham Bali bertujuan untuk mewujudkan layanan yang lebih cepat, mudah, humanis, akuntabel, dan transparan. Dengan arah yang jelas dan terukur, Kanwil Kemenkumham Bali yakin dapat memberikan layanan yang lebih baik dan berkualitas bagi masyarakat Bali.

Kanwil Kemenkumham Bali terus bergerak maju dalam mengimplementasikan transformasi digital layanan pemasyarakatannya dengan fokus pada beberapa arah utama, yaitu:

1. Layanan digital yang lebih modern dan terintegrasi di Kanwil Kemenkumham Bali merupakan langkah maju yang penting dalam menghadapi tantangan pemasyarakatan di era digital. Dengan berbagai inisiatif ini, diharapkan layanan pemasyarakatan di Bali dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, memberikan dampak positif bagi narapidana, petugas, dan masyarakat luas. Transformasi ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkumham Bali terhadap modernisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Kanwil Kemenkumham Bali telah menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan layanan pemasyarakatan yang lebih humanis dan ramah masyarakat melalui berbagai inisiatif digital. Dengan fokus pada empati, kemudahan akses, dan transparansi, diharapkan layanan pemasyarakatan di Bali tidak hanya menjadi lebih efisien dan akuntabel, tetapi juga lebih mendukung kesejahteraan narapidana dan keluarga mereka. Transformasi ini mencerminkan upaya Kanwil Kemenkumham Bali untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Kanwil Kemenkumham Bali telah menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan layanan pemasyarakatan yang lebih akuntabel dan transparan melalui berbagai inisiatif digital. Dengan fokus pada keterbukaan, tanggung jawab, dan efisiensi, diharapkan layanan pemasyarakatan di Bali dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi narapidana, petugas, dan masyarakat luas. Transformasi

ini mencerminkan upaya Kanwil Kemenkumham Bali untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan yang lebih besar terhadap institusi pemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Budianto, O. W., Nugroho, O. C., & Abdillah, J. (2021). *KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM: Adaptasi Perubahan dan Strategi Sumber Daya Manusia*. Balitbangkumham Press. <http://dx.doi.org/10.30641/kumhampress.69>
- Firdaus, K. S., & Yuningsih, A. (2023). Transformasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dalam Pelayanan di Masa Pandemi. *Bandung Conference Series: Public Relations*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcspr.v3i1.7004>
- Irawan, Y., Rahmalisa, U., & Aprilia, U. (2019). Sistem database pemasyarakatan studi kasus lapas kelas II A Pekanbaru. *Journal of Technopreneurship and Information System (JTIS)*, 2(2), 59–67. <https://doi.org/10.36085/jtis.v2i2.323>
- KOMINFO, P. (n.d.). *Peta Jalan Mempercepat Transformasi Digital*. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Retrieved July 10, 2024, from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35420/peta-jalan-mempercepat-transformasi-digital/0/artikel>
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- M.Si, Dr. Drs. I. N., & M.Si, Dra. S. H. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL*. MEDIA SAHABAT CENDEKIA.
- Nugroho, A., & Setyawan, A. (2019). APLIKASI MANAJEMEN PELAYANAN KUNJUNGAN BERBASIS WEB PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA. *JSil (Jurnal Sistem Informasi)*, 6(2), 115. <https://doi.org/10.30656/jsii.v6i2.1728>
- Permenkumham no. 30 tahun 2021*. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/203696/permenkumham-no-30-tahun-2021>
- Raba, M. (2006). *AKUNTABILITAS Konsep dan Implementasi*. UMMPress.
- Riyadi, R., & Noerman, T. (2023). *Sistem informasi sumber daya manusia era digital*. Universitas Brawijaya Press. <http://dx.doi.org/10.11594/ubpress9786232967847>
- Sustono, S. (2017). Analisis dan Perencanaan Strategis Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK. *Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer*, 5(3), 275. <https://doi.org/10.22441/incomtech.v5i3.1144>
- Yunaningsih, A., Indah, D., & Eryanto Septiawan, F. (2021). Upaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi. *Altasia : Jurnal Pariwisata Indonesia*, 3(1), 9–16. <https://doi.org/10.37253/altasia.v3i1.4336>
- Zed, M. (n.d.). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.